

Press Release

General Assembly

SEAPAC (Southeast Asian Parliamentarians against Corruption)

Medan, 23-24 Oktober 2013

- DPR RI telah menyelenggarakan Sidang Umum SEAPAC, Southeast Asian Parliamentarians against Corruption, di Hotel Aryaduta Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 23-24 Oktober 2013 dengan tema "*Corrupt-Free Southeast Asia: Common Goal, Common Action*".
- Sidang SEAPAC dihadiri oleh 47 orang anggota Parlemen dari 7 negara (dari total 11 negara) di kawasan Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Timor Leste, Laos, Malaysia, dan Indonesiasebagai tuan rumah. Selain itu turut hadir pula perwakilan dari beberapa institusi regional/internasional, yaitu: GOPAC (*Global Organization Parliamentarians Against Corruption*), ARPAC (*Arab Region GOPAC Regional Chapter*), SAPAC (*South Asia GOPAC Regional Chapter*), AIPA (*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*), *Transparency International Indonesia*, ACWC (*ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*), dan IIDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*). Perwakilan dari KPK juga turut hadir sebagai salah satu pembicara.
- SidangUmum SEAPAC yang diselenggarakan di Medan telah menerima keanggotaan para anggota parlemen yang baru bergabung dengan SEAPAC. Mereka adalah anggota parlemen dari Kamboja dan Laos, sedangkan Brunei Darussalam mengajukan diri untuk menjadi Observer. Sidang juga telah mengangkat anggota Parlemen dari Malaysia dan Timor Leste sebagai Sekretaris dan Bendahara.
- Dari Delegasi Indonesia, Andi Anzhar Cakra Wijaya terpilih sebagai wakil Indonesia di SEAPAC, sementara itu Dr. Pramono Anung Wibowo dan Ketua Senat Malaysia, Tan Sri Abu Zahar Ujang, terpilih sebagai wakil SEAPAC di Jajaran Direksi GOPAC.
- Sidang Umum SEAPAC telah membahas sejumlah topik, yaitu: 1) Patronase Politik dan Dampaknya terhadap Korupsi; 2) Gender, budaya, dan korupsi; 3) Mobilisasi Massa; dan 4) Memperbaiki Kepercayaan Publik.
- Beberapa hal yang dapat diambil dari berbagai pembahasan tersebut, antara lain: 1) Patronase politik merupakan permasalahan yang kompleks dan jamak ditemui di banyak negara, termasuk negara maju seperti Australia; 2) Partisipasi politik yang berimbang antara pria dan wanita merupakan salah satu aspek utama dalam upaya menciptakan lingkungan politik yang kondusif, transparan, dan akuntabel, namun tidak ada korelasi yang nyata antara gender dan probabilitas korupsi; 3) Media sebagai salah satu pilar demokrasi juga merupakan cerminan masyarakat sehingga prinsip-prinsip *freedom of the press* hendaknya ditegakkan dan

dihormati; 4) Sehubungan dengan isu *money politics*, penggunaan politik uang dapat mencederai sistem politik yang menjadi akar dari segala permasalahan; dan 5) Diperlukan upaya maksimal untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memberikan kesadaran bahwa sikap apatis terhadap politik bukan merupakan solusi yang bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini.

- Sidang Umum SEAPAC kali ini juga telah menyetujui dan mengadopsi Medan Declaration yang merupakan hasil kesepakatan dan penegasan komitmen mereka yang telah hadir di acara ini terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Deklarasi Medan menyepakati beberapa hal, antara lain: 1) Tidak ada kekebalan hukum dalam bentuk apapun yang dapat diberikan kepada seseorang, termasuk pejabat publik, yang terlibat dalam kasus korupsi; 2) Diperlukan kerjasama yang lebih erat antar berbagai pihak, termasuk NGO, media, sektor swasta, dan institusi yang berkaitan dengan pengawasan korupsi; dan 3) Anggota Parlemen harus berpartisipasi dalam mempromosikan prinsip-prinsip UNCAC (United Nations Convention on Anti-Corruption) yang terdiri dari: upaya pencegahan, kriminalisasi, pengembalian aset, kerjasama internasional, dan mekanisme pengawasan yang efektif.
- Isi dari Deklarasi Medan secara lengkap dapat dilihat di website ksap.dpr.go.id/seapac. Alangkah baiknya apabila media massa juga dapat menginformasikan isi dari Deklarasi Medan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengampanyekan strategi pemberantasan korupsi yang tengah diupayakan oleh DPR RI.
- Jumlah uang yang hilang akibat berbagai tindak kejahatan korupsi di dunia diperkirakan mencapai 2,6 milyar USD, cukup untuk membantu kehidupan 1,4 milyar masyarakat miskin dunia yang hidup kurang dari 1 USD per hari. Jelas bahwa dampak korupsi sangat mengkhawatirkan.
- Sebagai tuan rumah, Indonesia, khususnya DPR RI sebagai penyelenggara Sidang Umum SEAPAC, memiliki kepentingan yang begitu besar terhadap kerjasama regional dalam pemberantasan korupsi. DPR RI sangat prihatin terhadap maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di dalam negeri. Namun perlu disadari pula bahwa banyak di antara kasus-kasus tersebut yang melibatkan berbagai pihak di negara lain. Korupsi bukan lagi merupakan isu domestik, tetapi sudah dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas negara, sebagaimana juga diakui oleh UNCAC bahwa korupsi merupakan ancaman trans-nasional. Karena itulah, melalui SEAPAC, DPR RI berupaya untuk mengambil inisiatif dan mendorong langkah konkret demi mewujudkan kerjasama antar negara dalam pemberantasan korupsi.
- Diperlukan langkah-langkah yang berkelanjutan dan sistemik untuk memberantas korupsi. Korupsi merupakan ancaman besar terhadap kemajuan pembangunan nasional. Korupsi harus dipandang sebagai musuh bersama. Saat ini, semua negara ASEAN dan Timor Leste telah menjadi negara pihak UNCAC. Namun demikian, masih diperlukan upaya konkret dalam mewujudkan poin-poin yang dimuat dalam UNCAC, terutama dalam aspek penerapan *asset recovery* dan ekstradisi di kawasan Asia Tenggara.

- Sebagai informasi, SEAPAC didirikan sejak tahun 2005 di Manila, Filipina, sebagai Regional Chapter GOPAC (*Global Organization of Parliamentarians against Corruption*) yang bermarkas di Kanada. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang anggota DPR RI bergabung menjadi anggota SEAPAC melalui pembentukan Gugus Tugas Nasional Anti-Korupsi pada Desember 2012. Saat ini, jumlah anggota DPR yang bergabung dengan SEAPAC sudah mencapai 39 (tiga puluh sembilan) orang.
- DPR RI berharap bahwa melalui upaya *second-trackdiplomacy*, kami dapat mendorong kemajuan kerjasama regional dalam pemberantasan korupsi dan menjadi role model bagi masyarakat untuk dapat menolak dengan tegas segala upaya yang mengarah pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
- Terima kasih kepada segenap jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Kota Medan atas segala dukungan yang diberikan demi terselenggaranya Sidang Umum SEAPAC. Sebagai nilai tambah, tentunya kami selaku penyelenggara Sidang Umum SEAPAC, berharap agar provinsi Sumatera Utara juga semakin dikenal sebagai salah satu tujuan wisata berkelas internasional.
- Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media yang telah turut berpartisipasi dalam mensosialisasikan Sidang SEAPAC ini kepada masyarakat luas.
